

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya

Yesika Yanuarisa

Jurusan Akuntansi, FEB Universitas Palangka Raya

E-mail: yesika.yanuarisa@feb.upr.ac.id

Abstract

This study aims to determine the phenomenon of financial management of Yayasan Yusuf Arimatea in Palangka Raya in the observation year of 2019. The research method uses a qualitative method with a phenomenological approach to reveal the meaning of financial management of Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya. Data collection techniques are done through interviews, observation and documentation.

The results showed that the accountability of the financial reporting of Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya had been carried out in accordance with generally accepted accounting standards. Evidenced by the existence of financial statements that have been made, which states that there is accountability to the GKE Resort Assembly Palangka Raya Hulu. The meaning of grieving for the bereaved family shows horizontal accountability by the trustees of the foundation to the Church and members of the Church as partners in the ministry.

Keywords: *Accountability, Financial Management, Non-profit Organizations*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui fenomena akuntabilitas pengelolaan keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya pada tahun pengamatan penelitian 2019. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk mengungkap makna akuntabilitas pengelolaan keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Dibuktikan dengan adanya laporan keuangan yang telah dibuat, yang menyatakan adanya pertanggungjawaban kepada pihak Majelis Resort GKE Palangka Raya Hulu. Makna pelayanan kedukaan kepada keluarga duka menunjukkan akuntabilitas secara horizontal oleh pengurus yayasan kepada Gereja dan warga Gereja sebagai rekan kerja dalam pelayanan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan, Yayasan

PENDAHULUAN

Akuntabilitas dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia saat ini bukan lagi hanya menjadi kewajiban bagi lembaga pemerintah atau swasta saja, tetapi sudah menjadi kewajiban bagi hampir semua jenis organisasi, tidak terkecuali organisasi nonlaba. Yayasan termasuk dalam kategori organisasi nonlaba yang tidak mengutamakan kepentingan individual organisasi dalam menghasilkan laba tetapi aktivitas utamanya adalah mengupayakan dalam melakukan pelayanan bagi publik. Sistem pengelolaan keuangan yang berbeda dengan pengelolaan organisasi swasta atau publik membuat keunikan bagi organisasi ini. Amanat menjalankan pelayanan bagi publik/masyarakat menjadi salah satu tujuan utama organisasi ini. Berdasarkan tujuan tersebut tentu saja diperlukan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Akuntabilitas merupakan indikator yang harus dijalankan oleh setiap organisasi baik swasta atau publik. Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik adalah semakin meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti halnya yayasan. Tuntutan akuntabilitas ini terkait dengan perlunya transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka memenuhi hak-hak publik.

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Regulasi tersebut terkait langsung untuk lembaga pemerintah dan juga bagi lembaga non-pemerintah yang menjadi bagian dari sektor publik dalam hal ini yayasan.

Yayasan juga memiliki payung hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, dimana prinsip akuntabilitas dan transparansi publik selain kemandirian yayasan sebagai badan hukum dan prinsip nonlaba yang menjadi hal fundamental bagi suatu yayasan karena organisasi nonlaba seperti yayasan berbeda dengan organisasi yang berorientasi pada laba. Dalam menjalankan kegiatannya, organisasi nonlaba tidak semata-mata digerakkan oleh tujuan untuk mencari laba. Perbedaan karakteristik nonlaba dan bisnis terdapat pada standar laporan keuangannya. Akan tetapi, tujuan organisasi nonlaba dan organisasi bisnis tidak memiliki perbedaan dalam tujuan dan fungsi pembuatan laporan keuangan atau akuntansi.

Tujuan pembuatan laporan keuangan sebuah organisasi adalah mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi publik. Selain itu, organisasi nonlaba harus melaporkan perkembangan pendanaan organisasi kepada *stakeholders* sehingga *stakeholders* dapat melakukan pengawasan secara terbuka kepada organisasi. Tujuan dibuatnya laporan keuangan pada entitas nonlaba agar tercipta laporan keuangan yang mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi, diperlukan penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan organisasi nonlaba agar penyumbang atau masyarakat dapat memperoleh informasi keuangan dengan mudah.

Perlunya akuntabilitas menurut Mustofa (2012), merupakan tujuan reformasi dari sektor publik. Perbaikan transparansi dan akuntabilitas adalah kunci keberhasilan dalam membangun ekonomi publik yang lebih baik karena di dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan terutama di bidang administrasi

keuangan kepada pihak yang lebih tinggi atau atasannya.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yayasan diharapkan mampu mewujudkan pertanggungjawaban tindakan dan keputusan dalam laporan keuangan guna membangun kepercayaan. Maka pengelola berkewajiban untuk melaporkan dan menjelaskan tiap aktivitas keuangan yang terjadi baik adanya dana masuk ataupun keluar. Transparansi disini dimaksudkan adanya keterbukaan dalam mengelola laporan keuangan agar mengurangi praktik korupsi kolusi dan nepotisme serta tindakan pencucian uang yang lagi marak terjadi pada organisasi nirlaba (Sitorus dkk, 2013).

Yayasan bergerak dalam berbagai sektor seperti sektor pendidikan, agama, dan sosial atau kemanusiaan. Keberadaan yayasan juga tidak luput dari keinginan masyarakat untuk memiliki suatu wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu dibentuk yayasan yang dalam menjalankan roda kegiatannya dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya adalah salah satu dari organisasi nonlaba yang memberikan pelayanan sosial dalam bentuk pelayanan kedukaan di kota Palangka Raya. Yayasan ini berada di bawah naungan Majelis Resort GKE Palangka Raya Hulu yang didirikan pada tahun 1990. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, tentu yayasan ini harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya. Oleh karena itu, bentuk akuntabilitas Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya adalah harus menyusun laporan keuangan untuk memenuhi kriteria akuntabel sehingga kondisi keuangan dan pengelolaan dana yayasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui

akuntabilitas pengelolaan keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya dalam periode pengamatan penelitian tahun 2019.

KAJIAN TEORI

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu karakteristik yang diperankan oleh organisasi sektor publik. Mardiasmo (2018) menjelaskan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Bastian (2010) memaknai akuntabilitas sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/badan hukum/ pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas terdiri atas dua macam, yakni: akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Akuntabilitas vertikal merupakan akuntabilitas berupa pertanggungjawaban yang dilakukan kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal merupakan akuntabilitas berupa pertanggungjawaban yang dilakukan kepada masyarakat atau lembaga yang setara.

Sedangkan akuntabilitas menurut Pujiningsih (2013) adalah mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada pemberi amanah atau yang mendelegasikan kewenangan puas terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan. Jadi,

akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban manajemen (*agent*) atau pihak yang memperoleh kepercayaan untuk mengelola sumber daya kepada publik (*principal*) atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Sedarmayanti (2015) mengatakan pelaksanaan akuntabilitas perlu memperhatikan asas-asas dalam akuntabilitas, yaitu:

- a. Komitmen pimpinan dalam melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel
- b. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan
- c. Berorientasi pada pencapaian misi dan visi dan hasil manfaat yang diperoleh
- d. Jujur, objektif, transparan, dan inovatif

Dari asas tersebut dapat disimpulkan bahwa asas akuntabilitas merupakan asas pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh pemegang keputusan sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*.

Adanya asas dalam akuntabilitas maka terdapat manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan akuntabilitas, yaitu:

- a. Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi
- b. Mendorong terciptanya transparansi dan *responsiveness* organisasi
- c. Mendorong partisipasi masyarakat
- d. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan ekonomis, terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya
- e. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja
- f. Mendorong terciptanya iklim kinerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin
- g. Mendorong kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Akuntabilitas Organisasi Nonlaba

Praktik akuntansi dan akuntabilitas pada lembaga keagamaan atau lembaga nonlaba memang masih dianggap sesuatu yang tidak lazim. Walaupun tidak lazim penelitian terhadap praktik akuntansi pada lembaga keagamaan seperti yayasan yang dinaungi oleh Gereja, telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti akuntansi. Seperti yang dilakukan Randa (2011) yang menyimpulkan akuntabilitas spiritual pada organisasi Gereja Katolik memberikan makna pada komunitas Gereja untuk menjaga hubungan vertikal dan horizontal. Penelitian Patty dan Irianto (2013) menemukan makna akuntabilitas organisasi gereja berkaitan dengan pengumpulan dana umat, disebut "Perpuluhan". Perpuluhan ada delapan yaitu: perpuluhan sebagai milik Tuhan, tanda pengakuan, kasih, kemurahan, iman, kepercayaan, tanggung jawab diri, dan tanggung jawab sosial. Rini (2015) menyimpulkan pula bahwa akuntabilitas dalam organisasi Gereja bukan hanya sebagai kebutuhan namun lebih pada jati diri Gereja dalam membangun hubungan antara jemaat dan yang Maha Kuasa.

Penelitian lain yang berkenaan dengan konsep akuntabilitas pada organisasi keagamaan dijelaskan melalui penelitian dengan objek Masjid. Fitria (2017) menyimpulkan kerangka akuntabilitas menggambarkan bahwa bentuk-bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas formal dan informal) disusun untuk mencapai akuntabilitas kepada Allah. Oleh karena itu timbal balik dari dua bentuk akuntabilitas memimpin manusia sebagai khilafah Allah untuk memenuhi akuntabilitas kepada masyarakat dan Allah SWT. Siskawati dkk (2015) menyatakan akuntabilitas masjid dalam pengelolaan dana masjid adalah kejujuran. Kejujuran adalah nilai yang

dijunjung tinggi oleh pengurus masjid untuk mewujudkan kemakmuran melalui

Tuhan. Salle dan Lutfillah (2014) dalam penelitian mengenai akuntabilitas perspektif Islam menyimpulkan bahwa makna yang dapat diperoleh dari nilai keadilan dalam mempertanggungjawabkan amanah adalah bahwa setiap manusia harus mempertanggungjawabkan amanah dalam bentuk apa pun yang telah diberikan oleh pemberi amanah. Hal yang dapat dirasakan adalah pertanggungjawaban yang seadil-adilnya terhadap amanah adalah sebagai wujud penghambaan diri kepada Allah SWT.

Laporan Keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nonlaba telah dicabut dan digantikan ISAK (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) No 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba (berlaku efektif 1 Januari 2020) menyatakan tujuan utama laporan keuangan organisasi nonlaba yang sama dengan tujuan laporan yaitu menyajikan informasi yang relevan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Istilah terjemahan kata *"Not-for-Profit"*, semula terdapat dalam PSAK No 45 dirubah oleh DSAK IAI dalam ISAK No 35 menjadi Nonlaba dengan dasar bahwa sesungguhnya aktivitas utamanya tidak berorientasi mencari laba namun bukan berarti tidak menghasilkan laba (nirlaba).

ISAK No 35 mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. ISAK 35 yang diterbitkan oleh DSAK IAI merupakan interpretasi dari PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan paragraf 05 yang memberikan contoh bagaimana entitas berorientasi nonlaba membuat penyesuaian baik: (i) penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk

hubungan dua arah antara masyarakat dan

pos-pos tertentu dalam laporan keuangan; dan (ii) penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri. ISAK 35 dilengkapi dengan contoh ilustratif dan dasar kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari ISAK 35.

Menurut ISAK No 35, laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

1. Laporan Posisi Keuangan

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, serta aktiva bersih, dan informasi mengenai hubungan unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Pengungkapan dan informasi dalam laporan posisi keuangan serta bentuk informasi lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota entitas nonlaba, kreditur, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menilai:

- a. Kemampuan entitas nonlaba dalam memberikan jasa secara berkelanjutan
- b. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

2. Laporan Penghasilan Komprehensif

Tujuan utama laporan penghasilan komprehensif adalah untuk menunjukkan jumlah surplus (defisit) dan penghasilan komprehensif lain. Laporan ini menyediakan informasi mengenai:

- a. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah pendapatan
- b. Hubungan antar transaksi dan peristiwa lain mengenai jumlah beban
- c. Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

Informasi dalam laporan Laporan

Penghasilan Komprehensif memuat informasi mengenai penghasilan komprehensif tanpa pembatasan dari

3. Laporan Perubahan Aset Neto

Laporan ini menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya (misalnya jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan).

4. Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode. Informasi arus kas yang disajikan dalam laporan keuangan berguna untuk menilai kemampuan organisasi dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang arus kas masa depan dari berbagai organisasi.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK menguraikan kebijakan pengungkapan yang diwajibkan yang menyebabkan laporan keuangan lainnya wajib disajikan. CaLK menyediakan informasi yang dianjurkan untuk diungkapkan oleh entitas berorientasi nonlaba.

Organisasi Nonlaba

Nonlaba adalah istilah yang biasa digunakan sebagai sesuatu yang bertujuan sosial, kemasyarakatan atau lingkungan yang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan materi (uang). Organisasi nonlaba adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter).

pemberi sumber daya dan penghasilan dengan pembatasan dari pemberi sumber daya.

Organisasi nonlaba meliputi pura, gereja, masjid, sekolah negeri, derma politik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, asosiasi professional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah (Tinungki dan Pusung, 2015). Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa organisasi nirlaba tidak bertujuan mencari laba akan tetapi murni melayani masyarakat.

Untuk mendirikan sebuah organisasi nirlaba tentunya terdapat manajemen yang terkait, pada manajemen organisasi nonlaba mempunyai tugas untuk melaksanakan misi organisasi, mencapai sasaran jangka panjang atau pendek, memberi manfaat bagi kelompok masyarakat. Selain manajemen pada suatu organisasi akan terdapat pengurus dalam organisasi, organisasi nirlaba pada umumnya memilih pengurus, pemimpin atau penanggung jawab yang menerima amanah dari para anggotanya sehingga terkait dengan konsep akuntabilitas dan dengan demikian, akuntansi sebagai salah satu sarana akuntabilitas merupakan bagian integral dari organisasi, pemahaman terhadap akuntansi suatu entitas selalu menuju kepada pemahaman yang lebih dalam tentang entitas tersebut.

Hidayati (2012) mengungkapkan bahwa organisasi nirlaba atau organisasi yang tidak bertujuan memupuk keuntungan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang /atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada

para pendiri atau pemilik entitas tersebut.

3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nonlaba atau pembubaran entitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memahami makna akuntabilitas pengelolaan keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya sehingga pemahaman secara mendalam akan dapat diperoleh dengan pendekatan tersebut. Pendekatan fenomenologi bertujuan mengetahui bagaimana peneliti menginterpretasikan tindakan sosial peneliti dan orang lain sebagai sebuah yang bermakna (dimaknai) dan untuk merekonstruksi kembali turunan makna (makna yang digunakan saat berikutnya) dari tindakan yang bermakna pada komunikasi intersubjektif individu dalam dunia kehidupan sosial.

Peneliti mengembangkan deskripsi yang bersifat tekstural dari pengalaman informan yaitu apa yang dialami oleh pengurus dan pengawas Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya dalam memaknai akuntabilitas pengelolaan keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya. Peneliti tidak hanya sekedar mendeskripsikan fenomena namun yang terpenting adalah menjelaskan makna, mendeskripsikan makna dari fenomena yang muncul dan menjelaskan makna dibalik makna (struktur makna) guna mendeskripsikan suatu pemahaman yang mendalam.

Konsep-konsep praktis tadi dianalisis dengan cara mengkomparasikan temuan atau pemahaman atas kenyataan sosial organisasi yang bersifat empiris dengan konsep dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya. Dari pemilihan metode penelitian di atas,

tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi

diharapkan peneliti dapat mencapai tujuan penelitian yaitu memahami makna akuntabilitas pengelolaan keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya.

Karena pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan fenomenologi, maka sumber data utamanya adalah kata-kata dan tindakan. Sedangkan untuk memperoleh data tambahan berupa laporan keuangan, dokumen pribadi/resmi dan sumber buku dilakukan penelaahan atas dokumen-dokumen relevan yang berhubungan dengan arsip-arsip yang dapat menunjukkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya. Untuk memperoleh semua data-data tersebut, peneliti berperan sebagai pengamat partisipan dalam *setting* penelitian ini. Peneliti terlibat langsung dalam melakukan wawancara dan pengamatan (observasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya didirikan pada tahun 1990 oleh Majelis Resort GKE Palangka Raya Hulu. Yayasan ini aktif menjalankan pelayanan kedukaannya dimulai sejak tahun 2001 pada saat Majelis Resort GKE Palangka Raya Hulu membuat susunan pengurus aktif bagi yayasan ini selama periode kepengurusan per 5 (lima) tahun sampai pada saat ini. Susunan pengurus Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya terdiri dari Tim Penasehat, Tim Badan Pengawas, Pengurus Inti, Tim Anggota dan Pembantu Umum.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pengurus Aktivitas Yayasan Yusuf Arimatea, aktivitas yayasan ini adalah memberikan pelayanan jasa kedukaan yang meliputi dua aktivitas utama yaitu:

Pelayanan kepada keluarga duka :

1. Pelayanan penyediaan peti jenazah dan asesories peti
2. Pelayanan penyediaan dipan jenazah.
6. Pelayanan jasa kendaraan Pick up.
7. Pelayanan jasa kendaraan *Ambulance*.
8. Penyediaan lubang makam di TPU Km.12 Jl. Tjilik Riwut.
9. Pelayanan pemasangan keramik makam.

Pengelolaan, Pemeliharaan dan penataan pemakaman :

1. Pemeliharaan kebersihan pemakaman dengan menugaskan 2 (dua) orang petugas kebersihan makam sehingga makam senantiasa bersih walaupun keluarga duka berada di luar kota Palangka Raya.
2. Secara rutin melakukan penyemprotan/ pembersihan rumput yang tumbuh disekitar makam.
3. Pembuatan lubang makam, dan penimbunan disekitar lokasi makam.
4. Pembuatan jalan masuk di lokasi makam
5. Membuat peta makam sehingga mempermudah bagi setiap keluarga yang ingin
6. Mengetahui letak lokasi makam keluarganya.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya

Akuntabilitas merupakan salah satu karakteristik yang diperankan oleh organisasi sektor publik. Mardiasmo (2018) menjelaskan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan

3. Pelayanan penyediaan tirai pembatas.

4. Pelayanan pengawetan jenazah.

5. Pelayanan jasa Tenda + Kursi (di TPU dan di rumah duka).

kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas laporan keuangan terkait pertanggungjawaban Pengurus Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya dalam penggunaan dan pencatatan keuangan, serta pelaporannya kepada pihak-pihak pemangku kepentingan yang memerlukan informasi keuangan tersebut. Akuntabilitas laporan keuangan merupakan salah satu dimensi yang paling ditekankan untuk mengukur integritas Pengurus Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya.

Sumber Keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya

Nainggolan (2005) menggolongkan berbagai macam pendapatan yayasan ke dalam dua golongan besar, yaitu: (1) Pendapatan bersumber dari sumbangan, merupakan semua penerimaan yang diperoleh yayasan dimana yayasan tidak perlu meghasilkan atau menyajikan suatu barang atau jasa kepada pemberi sumbangan. Kontraprestasi yang diharapkan oleh pemberi sumbangan dari yayasan tersebut adalah dalam bentuk jasa atau produk yang dihasilkan dari program-program yang dilakukan oleh yayasan; (2) Pendapatan non-sumbangan, merupakan pendapatan yayasan atas kegiatan usahanya sendiri. Pendapatan yang tergolong usaha sendiri dapat berupa usaha komersial dibawah yayasan (misalnya dividen dari perusahaan milik yayasan), hasil investasi harta yayasan (misalnya bunga deposito, penjualan properti yayasan) dan lain sebagainya.

Kategori pendapatan yayasan dapat

dilakukan berdasarkan pembatasan yang ditentukan oleh sumber pendapatan itu, antara lain Nainggolan (2005): (1) Pendapatan tidak terikat yaitu pendapatan yayasan yang termasuk dalam kategori tidak terikat merupakan pendapatan yang sama dari sumbangan yang diperoleh dari donatur yang secara khusus menyebutkan penggunaan jangka waktu atas penggunaan donasi tersebut; (3) Pendapatan Terikat Permanen yaitu pendapatan jenis ini biasanya diperoleh dengan batasan yang jelas untuk penggunaan dan asumsi bahwa jangka waktunya adalah untuk selamanya. Artinya, hanya untuk tujuan tertentu dan berlaku selamanya. Misalnya suatu yayasan pendidikan memperoleh donasi dalam bentuk gedung sekolah, maka atas donasi tersebut diberikan batasan bahwa gedung itu hanya boleh digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dan tidak boleh diperjualbelikan, baik sekarang maupun di masa depan dengan alasan apapun.

Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya tentunya membutuhkan dana untuk menunjang kegiatan operasional yayasan guna meningkatkan pelayanan jasa kedukaan kepada masyarakat. Sumber keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya berasal dari kegiatan usaha yayasan yang menimbulkan pembayaran jasa pelayanan kedukaan yang sesuai dengan permintaan oleh keluarga duka berdasarkan formulir pemesanan yang diberikan kepada keluarga duka oleh karyawan yayasan pada saat melakukan pelayanan tersebut.

Hal tersebut seperti yang disampaikan Ketua Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya, Bapak TN:

“Dana yayasan ini didapat dari pembayaran layanan duka yang yayasan berikan kepada keluarga duka. Kan saat keluarga duka minta pelayanan ada formulir pemesanan yang kami kasih. Disitu ada jenis

dengan pendapatan dalam perusahaan komersial, antara lain berupa sumbangan tidak terikat dan pendapatan usaha sendiri; (2) Pendapatan Terikat Sementara yaitu pendapatan jenis ini pada umumnya berasal

layanan yang bisa dipilih. Setelah selesai ibadah duka, keluarga duka bisa bayar ke bendahara yayasan sesuai dengan pemesanan mereka saat itu”.

Sumber keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya berdasarkan informasi oleh Bendahara, Bapak DE:

“Selama ini sistem pembayarannya bisa keluarga duka langsung datang ke saya sebagai bendahara untuk bayar. Selain itu ada juga petugas kami yang ditugaskan untuk nagih ke keluarga duka kalau keluarga duka berhalangan untuk langsung bayar ke saya. Nah setiap bulan pemasukan itu dibuku-kan dalam buku kas umum lalu dipisah lagi ke dalam buku kecil masing-masing akun aktivitas layanannya.”

Hal ini dipertegas oleh karyawan yang bertugas untuk menagih pembayaran layanan jasa kedukaan ke rumah keluarga duka, Bapak AN mengatakan:

“Bisa bayar langsung ke bendahara, bisa langsung ke kami karyawan yang ditugaskan nagih sesuai dengan kwitansi yang ada dari bendahara, baru kami serahkan kwitansi dan uangnya ke bendahara lagi. Untuk keluarga duka juga diberikan kwitansi bayarnya.”

Uraian sumber penerimaan dana bagi Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya menurut Bendahara bersumber dari pernyataan berikut:

“jadi kita ada macam-macam jasa layanan. Penerimaannya dari

pembayaran keluarga duka untuk layanan peti jenazah, asesoris peti, kain bordiran, tirai pembatas, jasa ambulance, gali ulang makam, dan seterusnya. Bisa lihat di laporan pengawasan lengkap catatannya.

sumber pendanaan Yayasan Yusuf Arimatea Kota Palangka Raya berasal dari kegiatan usaha yayasan yang mana terdapat pembayaran jasa layanan kedukaan oleh keluarga duka kepada pihak pengurus yayasan. Aktivitas tersebut disertai dengan formulir pemesanan sebagai dasar perhitungan kwitansi. Dari bukti-bukti transaksi tersebut sebagai dasar oleh Bendahara Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya untuk melakukan proses pembukuan yayasan. Selanjutnya penerimaan dana tersebut akan dikelola oleh bendahara untuk pengeluaran pengadaan jasa-jasa layan tersebut kembali.

Pencatatan dan Pelaporan Informasi Keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya

Pencatatan keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya telah dilakukan setiap adanya transaksi pengeluaran maupun pemasukan, pencatatan yang dilakukan oleh pengurus yayasan masih menggunakan pencatatan yang sederhana agar dapat mudah dipahami.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya, Bapak TN sebagai berikut:

“setiap akhir tahun kan ada pengawas-pengawas dari Resort GKE Palangka Raya Hulu yang bertugas periksa laporan keuangan yayasan, disitu nanti mereka akan periksa sumber penerimaan yayasan berapa, pengeluaran untuk apa aja kelihatan di laporan keuangannya”.

Nah, dari penerimaan itu kita akan bayar juga untuk pengadaan jasa-jasa tersebut. Yah, dananya akan mutar untuk aktivitas itu tadi.”

Temuan penelitian menyimpulkan bahwa

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bendahara Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya, Bapak DE berikut ini:

“Iya pasti dicatat semuanya itu, semua transaksi pasti dilakukan pencatatan. Untuk laporan keuangannya kami lengkap dari bukti-bukti transaksi. Ada formulir pemesanan, ada kwitansi, ada buku kas umum, lalu lengkap juga buku kecil aktivitas layanannya samapi ke rekening bank juga diperiksa oleh pengawas.”

Menurut ketentuan prinsip akuntabilitas, pengurus yayasan dalam pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan diwajibkan untuk membuat laporan tahunan, membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hal dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan yayasan termasuk kegiatan usaha. Laporan tahunan itu harus mendapatkan pengesahan yang ditandatangani oleh pengurus dan pengawas.

Hal tersebut didukung oleh pernyataan Ketua Pengawas Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya, Bapak TA sebagai berikut:

“kita sebagai petugas pemeriksa yang ditugaskan dari resort untuk periksa yayasan ini dengan ruang lingkup pemeriksaan pengelolaan keuangan yayasan tahunan, pengelolaan sarana dan prasarana dan organisasi manajemennya. Untuk laporan hasil pengawasan ada kami buat per tahun.”

Anggota Tim Pengawas, Bapak AM menyatakan hal yang serupa, yaitu:

“jadi yang kami periksa itu mulai dari buku kas umumnya, buku kecil tiap-tiap aktivitas layanannya, rekening koran bank, laporan aset secara tahunan. Hasil pengawasannya tahun 2019 ini

dengan metode pembukuan sederhana yaitu terdiri dari informasi pemasukan & pengeluaran dana yang terdiri dari bukti-bukti transaksi, buku kas umum, buku kas kecil masing-masing akun (jenis layanan duka). Penyajian laporan keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya yang dibuat pengurus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum yaitu berupa buku kas umum, buku kecil dan laporan aktivitas.

Pelaksanaan Akuntabilitas Horizontal

Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas terdiri atas dua macam, yakni: akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Akuntabilitas vertikal merupakan akuntabilitas berupa pertanggungjawaban yang dilakukan kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal merupakan akuntabilitas berupa pertanggungjawaban yang dilakukan kepada masyarakat atau lembaga yang setara.

Akuntabilitas horizontal merupakan akuntabilitas berupa pertanggungjawaban yang dilakukan kepada masyarakat dalam hal ini umat atau lembaga yang setara. Pertanggungjawaban laporan keuangan yang dilakukan pengurus Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya kepada Majelis Resort GKE Palangka Raya Hulu sebagai bentuk ketaatan terhadap tata cara “Gereja Kalimantan Evangelis” Ketaatan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai Pengurus Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya sejalan dengan keputusan yang berlaku.

sudah sesuai dengan standar keuangan yang berlaku umum, jelas penerimaan dan pengeluaran serta saldonya.”

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa pencatatan dan pelaporan yang dipraktikkan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya sebagai berikut:

“kami sebagai pengurus Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya diberikan mandat untuk menjalankan pelayanan untuk keluarga-keluarga yang mengalami keduakaan yaitu bagi masyarakat Gereja. semua kan ada aturan yang jelas, ga boleh sembarang jalankan karena kita harus pertanggungjawab juga kepada Majelis juga.”

Mempertegas pernyataan tersebut, Bendahara Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya menambahkan:

“kita wajib melayani dengan “prinsip kasih” dan juga harus taat. Sudah selayaknya kami menjalankan mandat yang diberikan dengan baik untuk memberikan pelayanan kepada keluarga duka semaksimal mungkin sebagai bentuk menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut.”

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa Pengurus Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya telah melakukan akuntabilitas laporan keuangan secara horizontal dengan membuat laporan keuangan dan menyampaikan kepada Majelis Resort GKE Palangka Raya Hulu dan diperiksa oleh badan pengawas yang ditetapkan. Pengurus Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya telah berupaya sebaik mungkin untuk

mempertanggungjawabkan semua amanah yang telah diterima kepada pemberi amanah yaitu Majelis Resort GKE Palangka Raya Hulu.

PENUTUP

Simpulan

Simpulan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya dimaknai dengan akuntabilitas sumber dana Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya berasal dari kegiatan usaha yayasan yaitu bersumber dari penerimaan pembayaran atas layanan jasa kedukaan yang dibayarkan oleh keluarga duka kepada yayasan. Transaksi tersebut disertai dengan kwitansi yang berguna sebagai bukti untuk setiap transaksi pembayaran.
3. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya berjalan baik, dibuktikan dengan adanya laporan keuangan yang telah dibuat pengurus Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya tahun 2019 yang menyatakan adanya pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut, dalam hal ini kepada Majelis Resort GKE Palangka Raya Hulu.
4. Keterbatasan dalam penyajian laporan keuangan yang dibuat pengurus Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya belum sepenuhnya menerapkan ISAK No 35. Namun pelaporan keuangan yang dibuat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Laporan keuangannya terdiri dari buku kas umum, buku kecil transaksi dan rekening koran bank.
5. Pelaksanaan akuntabilitas horizontal pengurus Yayasan Yusuf Arimatea Palangka kepada Majelis Resort GKE

1. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya sudah berjalan cukup baik, yaitu adanya keterlibatan semua pemangku kepentingan mulai dari Ketua Yayasan hingga seluruh staf yang bertugas, yang sudah terlaksana setiap tahunnya.

Palangka Raya Hulu sebagai bentuk ketaatan terhadap tata cara “Gereja Kalimantan Evangelis”. Ketaatan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai Pengurus Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya sejalan dengan keputusan yang berlaku.

Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan di atas adalah sebagai berikut: (1) Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya tetap mempertahankan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana yayasan yang telah diimplementasikan, agar selalu konsisten menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengelola pelayanan kedukaan bagi keluarga duka yang membutuhkan, (2) Perbaiki secara terus menerus merupakan langkah dalam pengelolaan dana dengan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan yang terbaru dalam hal ini dapat menerapkan ISAK No 35 sebagai standar pelaporan keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka, diharapkan nantinya laporan keuangan tersebut dapat lebih relevan sesuai dengan komponen laporan keuangan yang terdapat dalam ISAK No 35.

REFERENSI

Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Yayasan*

- dan Lembaga Publik. Jakarta: Erlangga.
- Dharma, I Nyoman, Wibowo, Agus Satrya dan Yanuarisa, Yesika. 2019. *Studi Etnografi Akuntabilitas Laporan Keuangan Berdasarkan Aspek Tri Hita Karana Di Pura Pitamaha Kota Palangka Raya*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. FEB Universitas Palangka Raya.
- Fitria, Yunita. 2017. *Akuntabilitas pada Ikatan Akuntansi Indonesia*. 2018. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2018. *Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Beorientasi Nonlaba (berlaku efektif 1 Januari 2020)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2018. *Perwujudan Transparansi Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, & Iqbal, A. 2012. *Pengaruh Penyajian Dan Akesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pematang Jaya*. *Accounting Analysis Journal*, 2. Vol 2.
- Musahiddinsyah T., Sanusidan Teuku Ahmad. 2020. *Pengelolaan Yayasan Menurut Asas Keterbukaan dan Akuntabilitas (Studi Pada yayasan Kemanusiaan di Aceh)*. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Volume 8 No. 1.
- Nainggolan, Pahala. 2005. *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nonlaba Sejenis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Organisasi Religi: Studi Kasus Masjid-Masjid di Balikpapan, Kalimantan Timur. *Jurnal Akuntabel* Vol. 14 No.1
- Hidayati, Irma. 2015. *Akuntansi Organisasi Nonlaba "Sesuai Atau Tidak?" (Studi Kasus pada Ponpes Roudlotul Muhtadidin Balekambang Gemiring Lor Nalumsari Jepara)*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Jepara.
- Patty, Agustina Christina dan Irianto, Gugus. 2013. *Akuntabilitas Perpuluhan Gereja*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)*.
- Pujiningsih, Sri. 2013. *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.
- Randa, Fransiskus, Triyuwono, Iwan, Ludigdo, Unti, dan Sukoharsono, Eko. G. 2011. *Studi Etnografi: Akuntabilitas Spiritual pada Organisasi Gereja Katolik yang Terinkulturasi Budaya Lokal*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)* Vol. 2 No.1
- Rini, Ayu Dwidyah. 2015. *Relevansi Sustainability, Accountability, Transparency Program Entrepreneurial University terhadap Sikap Komunitas Gereja*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)* Vol. 6 No. 5
- Salle, Ilham Z, dan Lutfillah, Novrida Q. 2014. *Akuntabilitas Perspektif Islam. Akuntansi Syariah: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta
- Saputri, Rahel Eka. 2020. *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Organisasi Nirlaba*. Skripsi Terpubikasi. Universitas Sanatha Dharma, Yogyakarta.

- Sari, Meriska., Mintarti, Sri dan Fitria, Yunita. 2018. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Keagamaan*. Jurnal Kinerja Volume 15 (2). FEB Unmul.
- Sedarmayanti, & Hidayat, S. (2015). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju
- Simanjuntak, D. A, dan Junarsi, Yeni. 2011. *Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 14. Aceh
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tinungki, A. N. M & Pusung. R. J. 2014. *Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nonlaba Berdasarkan PSAK No.45 Pada Panti Sosial Tresna Werdha Hana*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 2 (2).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan
- Yanuarisa, Yesika, Rosidi dan Irianto, Gugus. 2013. *Fenomenologi Transendental Dalam Transparansi dan Akuntabilitas Performance Based Budgeting*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL) Volume 12 (2), 208-221
- Siskawati, Eka, Ferdawati, dan Surya, Firman. 2015. *Bagaimana Masjid dan Masyarakat Saling Memakmurkan? Pemaknaan Akuntabilitas Masjid*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL) Vol. 7 No.1
- Sitorus, D. C., Nasution, B., & Windha. 2013. *Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Yayasan Dalam Rangka Mencegah Praktik Pencucian Uang*. Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.4.